

ANALISA KINERJA APARATUR DALAM PENANGNAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Author

Reza Abdul Razak¹, Irfan Setiawan²

Affiliasi

Pemerintah Kabupaten Berau¹, Institut Pemerintahan Dalam Negeri²

email

irfansetiawan@ipdn.ac.id²

*Corresponding author

Irfan Setiawan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

irfansetiawan@ipdn.ac.id

Received: June 12, 2023

Revised: June 18, 2023

Accepted: June 27, 2023

Available Online: June 30, 2023

ABSTRAK

Terjadinya peningkatan pada jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada anak terlantar disebabkan karena masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi seperti dari aspek pelayanan dan anggaran yang disediakan pemerintah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak terlantar di Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Data Primer yang berasal dari aparatur dinas Sosial seperti data hasil obeservasi dan wawancara, kemudian data sekunder berasal dari dokumentasi di lokasi dan sumber online lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur dalam penanganan terhadap anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Berau melalui Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat digolongkan baik dari segi tujuan, standar, umpan balik, motif dan peluang balik, motif dan peluang. Namun masih kurang dari segi tujuan sumber daya manusia yang mendata dan kompetensi aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Kata Kunci: program pemerintah, penanganan masalah social, anak terlantar

ABSTRACT

The increase in the number of neglected children with social welfare problems is due to the fact that the services provided for people with social welfare problems are still not optimal. Several factors often influence this, such as the service and budget aspects provided by the government. This research was carried out with the aim of finding out how abandoned children are handled in Berau Regency. This research uses qualitative methods, Primary Data comes from Social Service officials such as data from observations and interviews, then secondary data comes from on-site documentation and other online sources. The results of the research show that the performance of the apparatus in handling abandoned children at the Berau Regency Social Service through the Program for People with Social Welfare Problems can be classified as good in terms of objectives, standards, feedback, motives and opportunities for feedback, motives and opportunities. However, it is still lacking in terms of human

resource objectives that include data and competency of the apparatus at the Berau Regency Social Service.

Keywords: government programs, handling social problems, neglected children

PENDAHULUAN

Sebagai Negara berkembang Indonesia dianggap belum mampu melaksanakan sistem birokrasi dengan baik, hal ini karena banyak masyarakat yang kecewa terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah yang dianggap rumit. Pada dasarnya pemerintahan di Indonesia mencakup hal-hal penting salah satunya yaitu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam proses pelayanan publik ada 4 unsur yaitu jenis layanan, penerima layanan, penyedia layanan, serta kepuasan pelanggan (Barata, 2004).

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas kinerja pegawai di organisasi tersebut. Kinerja (*performance*) merupakan hasil kerja yang diraih seseorang atau sekelompok orang pada organisasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara sah, tidak mengabaikan hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999).

Perlu juga diperhatikan bahwa kinerja aparatur menjadi salah satu faktor kesuksesan sebuah organisasi, kinerja menjadi hal utama yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga perlu dilaksanakan penilaian terhadap suatu kinerja aparatur untuk dilakukannya evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kinerja baik perorangan maupun organisasi tersebut. Pelaksanaan pelayanan publik dimuat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dengan maksud memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah berperan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun Aparatur Negara itu sendiri. Mengacu pada hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan penuh keseriusan.

Hal yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik seperti kesederhanaan, kejelasan, kualitas pelayanan, akuntabilitas, serta kepuasan harus diwujudkan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik dilakukan oleh organisasi dengan memperhatikan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan dalam mengatasi masalah yang ada guna memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat serta memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bentuk pengabdian pemerintah kepada masyarakat salah satu urusan yang termasuk ke dalam urusan daerah berkaitan pelayanan dasar yaitu sosial. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah melakukan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial demi menjamin kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Permasalahan sosial menjadi salah satu urusan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah salah satunya terkait dengan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS yaitu orang atau golongan yang mempunyai hambatan, kesulitan atau gangguan selama menjalankan kehidupannya sehingga sulit menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Terdapat 2 faktor munculnya masalah sosial yang dialami oleh para PMKS yaitu faktor internal dan eksternal, untuk faktor internal sendiri seperti rendahnya tingkat pendidikan serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seseorang. Adapun faktor eksternal seperti bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta lingkungan.

Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Khoirunnisa, dkk, 2020). Dikategorikan sebagai anak terlantar jika seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga (Adhania, 2019). Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang harus diperhatikan oleh dinas social (Muslih, 2018). Selain karena jumlahnya yang meningkat,

masalah anak terlantar mempunyai lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling mempengaruhi bila hak serta kebutuhan mereka tidak terpenuhi.

Untuk mengatasi permasalahan anak terlantar di Kabupaten Berau maka dibentuklah Dinas Sosial yang mempunyai visi meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dilihat dari penyelenggaraan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Berau membuat suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau. Peraturan tersebut menjelaskan dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar perangkat daerah melakukan pencegahan, pembinaan, dan peningkatan kesejahteraan anak terlantar di Kabupaten Berau, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada semua aturan tersebut dirasa masih belum efektif dalam menangani masalah anak terutama anak terlantar (Perda Kabupaten Berau, 2015)

Berdasarkan dari data di Dinas Sosial Kabupaten Berau dilihat bahwa jumlah anak terlantar dari tahun 2017 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 87 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah anak terlantar di Kabupaten Berau sebanyak 123 jiwa, namun dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 jumlah anak terlantar di Kabupaten Berau menjadi 210 jiwa. Hal inilah yang menyebabkan belum optimal dalam menjalankan program anak terlantar. Banyak masalah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada anak terlantar.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2020, dijelaskan rincian masalah seperti masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan bagi PMKS yang terlihat dari aspek pelayanan dan anggaran yang disediakan mempengaruhi kualitas kinerja dari aparatur. Selain itu kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih kurangnya sumber informasi terkait data *real time* menyangkut anak terlantar, kurangnya motivasi, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Sosial yang belum menunjukkan kualitasnya. Walaupun sudah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap anak terlantar, namun tidak mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan anak terlantar mengakibatkan munculnya kekhawatiran dari masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial sangat tinggi karena selain berdampak langsung terhadap masyarakat juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak terlantar pada daerah tersebut sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan terhadap efektifitas kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Berau bukan hanya berasal dari masyarakat melainkan dari pihak Pemerintah Provinsi bahkan Pemerintah Pusat juga.

Hal ini juga berhubungan bagaimana aparat pada Dinas yang menyelenggarakan urusan tersebut dapat bekerja dan berkinerja dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan sukses bila aparatur pelaksanaannya dapat berkinerja dengan baik. Berdasarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kinerja pegawai dalam mengelola program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada anak terlantar di Kabupaten Berau. Maka penulis tertarik untuk mengkaji kinerja aparatur dalam penanganan anak terlantar melalui program penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana data yang tidak diperoleh tidak hanya angka, tetapi juga data yang didapat dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, memo, maupun dokumen resmi lainnya. Penulis mengkaji melalui dengan menggunakan teori Hersey & Blanchard (1982) dan George R. Terry (1972) dimana mengkaji penanganan program melalui kinerja aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Berau. Data yang didapatkan berasal Data Primer yang berasal dari aparatur dinas Sosial seperti data hasil observasi dan wawancara, kemudian data sekunder berasal dari dokumentasi yaitu Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan sumber online lainnya seperti jurnal, dan dokumen lainnya. Peneliti sebagai instrumen bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menguraikan data, dan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu sebagai instrumen, peneliti harus memastikan bagaimana penelitian kualitatif dilakukan pada saat dilapangan (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain selain manusia sebagai instrumen penelitian utama. Hal ini karena

segala sesuatu belum mempunyai kepastian secara jelas mulai dari prosedur, fokus, hipotesis yang dipakai, sampai hasil yang diharapkan. Semuanya masih harus dikembangkan selama penelitian berjalan. Karena keadaan yang tidak jelas dan pasti tersebut tidak pilihan lain selain peneliti itu sendiri yang dapat meraihnya selaku satu-satunya alat". Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman ada 3 kegiatan, yaitu: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclution Drawing/Verification* (Miles dan Huberman, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Aparatur Dalam Penanganan Anak Terlantar Melalui Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak terlantar di Kabupaten Berau. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur dalam penanganan anak terlantar. Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya terkait penjelasan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Berau bahwa terjadinya peningkatan pada jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada anak terlantar, masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan bagi PMKS yang terlihat dari aspek pelayanan dan anggaran yang disediakan mempengaruhi kualitas kinerja dari aparatur, kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan social.

Dalam hal substansi teknis dan praktis, masih kurangnya sumber informasi terkait data *real time* menyangkut anak terlantar, serta kurangnya motivasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Sosial yang belum menunjukkan kualitasnya. Walaupun sudah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap anak terlantar, namun tidak mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan anak terlantar mengakibatkan munculnya kekhawatiran dari masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kinerja pegawai dalam mengelola program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada anak terlantar di Kabupaten Berau. Maka Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Dikarenakan masalah ini akan terus meningkat jika tidak ditangani sehingga

memunculkan kekhawatiran terhadap masyarakat. Dalam hal ini kinerja aparat Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan guna mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial terutama permasalahan anak terlantar. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam sebuah instansi sesuai dengan tugas dan wewenang yang diemban dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini peneliti mengamati capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Berau dilihat berdasarkan indikator teori kinerja yang disampaikan oleh Hersey Blanchard dan Johnson 1982 yaitu Tujuan, Standar, Umpan Balik, Alat dan Prasarana, Kompetensi, Motif dan Peluang.

Tujuan

Pelaksanaan tugas pokok serta fungsi selaku aparat dalam sebuah organisasi publik mempunyai tujuan utama dalam tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dilakukannya penanganan terhadap anak terlantar yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial terutama terhadap anak. Namun jika melihat perbandingan dari tahun ke tahun maka terjadi peningkatan pada anak terlantar di tahun 2021 mengalami peningkatan 518 orang, data ini didapat dari Panti/LKSA di Kabupaten Berau serta laporan yang langsung masuk dari UPTD Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Berau sebanyak 12 orang dan anak terlantar yang ditempatkan di rumah singgah yaitu sebanyak 1 orang. Namun ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau. Salah satunya yaitu pemberian Bantuan Sosial Terencana Tahun Anggaran 2021 Dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk Panti/LKSA. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Panti/LKSA Penerima Bantuan Sosial Terencana Kabupaten Berau

No	Nama Panti/LKSA	Alamat	Jumlah
1	PA. LKSA AL-IHSAN	JL.P.HIDAYATULLAH	280
2	PA. LKSA NURUL MUHAJIRIN	JL. DIPONEGORO	126
3	PA. LKSA AL-HOLEL	JL. RAYA BANGUN	75
4	PA. LKSA HIDAYATULLAH	JL. SM BAYANUDDIN	25
5	PA. LKSA ANNUR MUHAMMADIYAH	JL. SUDIRMAN	12
TOTAL			518

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2021

Selain pemberian Bantuan Sosial Terencana Tahun Anggaran 2021 Dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk Panti/LKSA, untuk anak terlantar yang masuk dalam laporan UPTD Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Berau pada tahun 2021 diikutkan bimbingan mental dan pelatihan keterampilan UPTD PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) di Samarinda sebanyak 12 orang anak. Selain upaya yang dilakukan diatas, salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu menempatkan anak terlantar di rumah singgah selama seminggu kemudian diserahkan kepada keluarga terdekat atau diserahkan ke panti.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Berau ikut mendukung pemberdayaan anak terlantar melalui pelatihan yang diadakan oleh UPTD Panti Sosial Bina Remaja di Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tujuan aparatur dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak merupakan wujud realisasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau serta visi dan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Berau yaitu meningkatkan kualitas hidup penyandang PMKS. Dalam hal ini Dinas Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab guna merealisasikan dan mewujudkan hal tersebut sehingga diadakannya program-program sehingga tujuan organisasi yang sudah dirancang oleh pimpinan dapat tercapai sesuai dengan tepat waktu dan memiliki kualitas sangat baik dan maksimal. Pencapaian hasil tujuan sudah dapat dikatakan tercapai sehingga masyarakat juga dapat merasakan efek positif dari berkembangnya pemerintah yang ada di Kabupaten Berau mengenai pencapaian tujuan yakni dalam upaya meningkatkan kualitas hidup bagi para penyandang PMKS agar terciptanya kesejahteraan sosial.

Standar

Penyelenggaraan pelayanan yang baik mengacu pada standar operasional dan prosedur yang baik. Kejelasan mengenai standar pelayanan harus menggambarkan alur proses pelayanan yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya. Adapun standar operasional dalam penanganan anak terlantar merupakan faktor penting dalam

melaksanakan sebuah tugas mengingat mereka harus kerja sesuai dengan pedoman yang berlaku sesuai dengan undang-undang sehingga dapat berjalan dengan baik.

Adapun Dinas Sosial menyelenggarakan kegiatan berpedoman pada prosedur yang ditetapkan. Sesuai dengan pedomannya yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam hal ini maka aparaturnya bekerja tidak melebihi apa yang telah ditetapkan dan tidak menjalankan sebuah tindakan tanpa adanya standar operasional prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa segala kegiatan yang dilakukan sesuai standar yang diinginkan dengan prosedur pelayanan yang sudah ada. Penanganan yang dilakukan yaitu menerima laporan terkait daftar anak terlantar baik yang terjaring oleh Satpol-PP maupun laporan yang masuk melalui UPTD Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitupun hasil daripada pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa proses berjalannya penanganan anak terlantar sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tim Satuan Polisi Pamong Praja memiliki yang namanya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang patroli dan menerima aduan adanya anak terlantar/tuna sosial. Kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Pamong Praja terlebih dahulu untuk dilakukan pembinaan serta pengarahan. Setelah proses tersebut diserahkan ke Dinas Sosial.

Umpan Balik

Umpan balik dipakai sebagai bentuk masukan yang digunakan dalam mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan adanya umpan balik maka bisa dilakukannya evaluasi terhadap suatu kinerja sehingga dapat memperbaiki kualitas kinerja kedepannya. Dalam hal penanganan anak terlantar, umpan balik didapatkan melalui masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat perlu lebih aktif dan lebih peduli dengan lingkungan mereka selaku makhluk sosial sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara profesional demi mendapatkan kepuasan masyarakat. Masyarakat diberikan kemudahan dalam mengurus administrasi-administrasi yang ada di Kantor Dinas Sosial. Pelayanan yang

diberikan memperhatikan sedetail mungkin dengan langsung merespon bila ada laporan masyarakat terkait adanya anak terlantar yang ditinggalkan oleh orangtuanya.

Dinas Sosial memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Aparatur Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja sudah mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam melayani masyarakat yang dibebankan kepadanya. Begitupun pelayanan selama di pesantren, dimana para anak terlantar mendapatkan makan 3 kali sehari, pembekalan ilmu agama dan juga pendidikan sampai SMA. Pihak pesantren menerima bantuan dana untuk dikelola, dan memberikan laporan perkembangan anak terlantar tersebut kepada Dinas Sosial.

Alat dan Prasarana

Dalam mencapai tugas serta hasil kerja yang efektif dan efisien tanpa menghambat kegiatan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial membutuhkan adanya sarana dan prasarana, baik di dalam kantor maupun di lapangan. Sarana prasarana merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kualitas kinerja dari pegawai serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan itu sendiri.

Barang inventaris adalah barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di dalam suatu Instansi yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftarkan di dalam buku inventaris. Barang dan inventaris yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Sarana dan Prasarana yang Ada di Dinas Sosial Kabupaten Berau

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Yang Perlu Ditambahkan	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	6 Unit	1 Unit	Kurang
2	Kendaraan Roda 2	10 Unit	-	Cukup
3	Gedung Kantor	1 Unit	-	Cukup
4	Kursi	40 Buah	10 Buah	Cukup
5	Meja	40 Buah	10 Buah	Cukup
6	Komputer/PC	10 Buah	5 Buah	Kurang
7	Printer	10 Buah	5 Buah	Kurang
8	Note Book/ Laptop	6 Buah	2 Buah	Kurang
9	Air Conditioner	15 Unit	-	Cukup

10	Papan Struktur Organisasi	1 Buah	-	Cukup
11	Papan Pengumuman	1 Buah	-	Cukup
12	Filling Kabinet	10 Buah	5 Buah	Kurang
13	Lemari Arsip	4 Buah	6 Buah	Kurang
14	Brankas	1 Buah	1 Buah	Kurang
15	Mesin Ketik Manual	6 Buah	4 Buah	Kurang
16	Wireless	1 Buah	1 Buah	Kurang
17	Mesin Foto Kopi	1 Buah	1 Buah	Kurang
18	Televisi	6 Unit	-	Cukup
19	Dispenser	4 Unit	-	Cukup
20	Infokus/Proyektor	2 Unit	-	Cukup
21	Rumah Singgah	1 Unit	-	Cukup

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2021

Berdasarkan dari data tabel diatas, Dinas Sosial Kabupaten Berau dapat dilihat bahwa alat-alat inventaris dan sarana peralatan yang dimiliki dirasa belum cukup untuk menunjang kinerja aparatur dalam penyelenggaraan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan pelayanan tiap harinya namun barang Inventaris tersebut masih dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan. Terkait sarana dan prasarana rumah singgah disiapkan untuk anak terlantar. namun masih kekurangan terkait fasilitasnya.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa sarana dan prasarana sangat penting sebagai faktor pendukung keberhasilan suatu kegiatan namun didalam daftar barang inventaris tersebut terlihat beberapa sarana penunjang pelayanan yang masih kurang sehingga sering membuat pekerjaan terhambatnya.

Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas kinerja seseorang. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang pegawai juga mempengaruhi kualitas kinerja seseorang. Semakin tinggi pendidikannya biasanya semakin bagus juga kineja yang diberikan tergantung terhadap integritas yang diberikan. Aparat di Dinas Sosial Kabupaten Berau terdiri 35 orang, sisanya adalah pegawai honorer dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Sosial
 Kabupaten Berau Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DI-DIII	SMA	SMP	SD	
1	Pegawai Negeri Sipil	5	21	2	6	1	-	35
2	Tenaga Harian Lepas/honorar	-	5	-	17	-	-	23
Total		5	26	2	23	1		58

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Berau, 2022

Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki para pegawai sudah mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang ada. Hal ini karena banyaknya pegawai yang menempuh pendidikan sarjana sehingga mempengaruhi kompetensi dari para pegawai itu sendiri.

Pemimpin membutuhkan tenaga ekstra dikarenakan harus mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan para bawahanya agar berjalan sesuai dengan rencana. Jika kita lihat memang tidak mencukupi Dengan berbagai permasalahan yang ada, maka dibutuhkan pegawai sesuai dengan standar yang sudah ada. Secara faktual sudah baik terutama dalam menangani anak terlantar, mengingat banyaknya lulusan sarjana, selain itu juga mendapatkan pelatihan penanganan, bukan cuma menangani anak terlantar saja tetapi juga penanganan terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu sendiri.

Motif

Banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja didasari oleh motif dan alasan tertentu yang membuat mereka mau untuk melakukan pekerjaan tersebut. Alasan tersebut menjadi hal yang sangat mendasar bagi para pegawai untuk bekerja. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa pekerjaan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Aparatur yang bekerja di organisasi ini sesuai dengan Tupoksi dan bidang tugas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu Aparatur yang bersangkutan harus mampu memberikan kinerja terbaiknya dalam menindaklanjuti pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah untuk dapat diterapkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat penelitian, motif para Aparat dalam melakukan pekerjaannya sebagian besar karena tuntutan pekerjaan yang

diberikan harus memenuhi target sesuai rencana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten karena proses, hingga hasil pelaksanaan dan penggunaan anggaran wajib dilaporkan dan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan. Beberapa alasan yang sangat penting bagi pegawai untuk melakukan pekerjaannya seperti kewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, memperoleh reward atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dan lain sebagainya. Bagi sebagian Aparatur memiliki rasa empati yang tinggi adalah hal yang wajar dan lumrah dikarenakan sebagai seorang ASN harus bisa memprioritaskan yang mana kepentingan umum serta tugas pokok.

Pada dasarnya semua pegawai pasti mempunyai motivasi yang mendorong diri mereka untuk bekerja, akan tetapi biasanya sebagian besar motifnya adalah untuk mendapatkan reward dari tugas yang telah dilakukan. Namun perlu diingat bahwa sebagai seorang Aparatur kembali lagi pada tujuan awal dari dilaksanakannya program tersebut yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta mencapai tujuan dari Dinas Sosial.

Peluang

Peluang yang dimaksud dalam indikator kinerja yang terakhir yaitu kesempatan yang diberikan kepada atasan kepada Aparatur yang menunjukkan prestasi kerjanya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terlihat bahwa kesempatan yang diberikan aparatur adalah memberi masukan atau saran kepada pimpinan tetapi bukan untuk menilai pimpinan melainkan memberi inovasi atau masukan baru dalam melaksanakan tugas penanganan yang dilakukan agar proses penanganan dapat berjalan dengan secepat mungkin tidak membuang waktu dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa tiap pekerjaan yang dilakukan pasti ada hambatan atau rintangan yang dilewati dilapangan selama proses penanganan anak terlantar dilakukan, maka dari itu sebagai pimpinan organisasi harus bisa memahami aparatur yang bekerja dilapangan dan selalu memberikan kesempatan kepada aparatur untuk menyampaikan kendala yang terjadi dilapangan serta memberikan inovasi baru yang dilakukan aparatur demi kelancaran tugas dilapangan.

Setiap aparatur diberi kesempatan untuk memberi masukan dan saran terkait pelaksanaan tugas yang diberikan untuk menunjang prestasi kerjanya. Pimpinan sangat menerima masukan untuk membenahi organisasi agar jauh lebih baik kedepannya. Aparatur mempunyai peran penting dalam memberi masukan atau saran yang baik kepada pimpinan untuk memberi inovasi dan dapat menunjukkan keaktifan aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menangani para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama terhadap anak terlantar di lapangan.

KESIMPULAN

Kinerja Aparatur dalam penanganan terhadap anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Berau melalui Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat digolongkan cukup baik dari segi tujuan, standar, umpan balik, motif dan peluang. Dari segi tujuan sebenarnya terlihat dari bagaimana aparatur melakukan berbagai macam upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial termasuk kualitas hidup anak terlantar di Kabupaten Berau. Hanya saja yang menjadi kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendata jumlah anak terlantar sehingga wajar bila jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari segi sarana dan prasarana seadanya cukup membantu proses penanganan akan tetapi masih kurang sehingga masih banyak yang dibutuhkan alat untuk menunjang kinerja aparatur agar dapat bekerja secara maksimal serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari segi kompetensi aparatur banyak yang tidak sesuai kompetensinya, contohnya seperti banyak aparatur yang bukan merupakan sarjana sosial. Walaupun begitu, hal tersebut tertutupi karena mereka diberikan pelatihan dan pengetahuan tentang penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial salah satunya terhadap anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- A Adhania, Lhery Swara Oktaf, (2019). Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Di Kabupaten Lumajang. *Develop*, 3(2), 26-47. <https://doi.org/10.25139/dev.v3i2.1863>
- Barata, Atep Adya, 2004, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- dinsosriau.go.id, (pmks), penyandang di masalah kesejahteraan akses sosial, dari http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&

Dinas Sosial Kabupaten Berau, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2020

Hersey, Paul & Blanchard, Kenneth H, 1982, Management of Organizational Behaviour, Utilizing Human Resources, America, Prentice-Hall, Inc.

Kabupaten Berau, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan

Khoirunnisa, K., Ratna, E., & Irawati, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. *Notarius*, 13(2), 546-556. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.

Muslih, Hafid, (2018), Pendidikan Islam untuk anak terlantar: Penelitian di Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak [BPSAA] Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Prawirosentono, Suyadi, 1999, Kebijakan Kinerja Karyawan, Yogyakarta: BPFE

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R., 1972, Principles of Management, Edisi ke 6 Illinois, Richard D Irwin Homewood.10 11

Wibowo. 2016. Manajemen Kinerja Edisi Kelima. Jakarta: Rajagrafindo Persada.